

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 *Local Strongman*

Kajian studi tentang kekuasaan elit kuat lokal yang berada di luar lingkaran pemerintah mulai populer saat Migdal memperkenalkan analisis teoritik *local strongman* sebagai bagian dari studi dalam ilmu politik pada tahun 1988. Dimana kekuasaan *local strongman* yang berada di luar struktur pemerintahan dapat melemahkan otoritas dan kewenangan melebihi pejabat negara. Tinjauan pustaka ini menjelaskan bagaimana *local strongman* sebagai bagian dari elit non negara, mampu melakukan *control sosial* dan mengendalikan pemerintahan sehingga posisi para elit pejabat negara menjadi melemah.

Migdal menjelaskan pemahaman bahwa negara merupakan bagian yang terintegrasi dengan masyarakat. Karakteristik dan sifat negara tidak bisa dipisahkan dari karakter masyarakat di dalamnya. Migdal mendefinisikan negara adalah organisasi besar yang hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya diluar dirinya, termasuk organisasi-organisasi sosial formal dan informal. Keberadaan organisasi-organisasi informal di luar negara pada akhirnya menimbulkan masalah serta berbagai persoalan yang dapat mengurangi kemampuan atau kapabilitas sebuah negara sebagai alat pengontrol yang sah.⁷

⁷ Secara lengkap Migdal mengatakan, negara adalah organisasi yang luas di dalam masyarakat yang berdampingan dengan banyak organisasi sosial formal dan informal lainnya, dari keluarga, suku perusahaan industri besar. Yang membedakan negara di era modern setidaknya adalah bahwa pejabat negara mencari dominasi atas segudang

Migdal menguraikan beberapa argumen tentang pola kekuasaan *local strongman* ketika menapaki kekuasaannya di dalam sebuah negara.

1. *Local strongman* tumbuh subur di dalam masyarakat yang digambarkan sebagai sekumpulan organisasi-organisasi sosial yang nyaris mandiri.

Pola kontrol sosial ini telah ada dalam pemerintahan kolonial, *local strongman* ini akan berlangsung di dalam sebuah kelas-kelas pemilik tanah besar atau tuan tanah (kapitalis).

2. *Local strongman* mampu melakukan kontrol sosial karena mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Migdal menyebutnya sebagai “*strategi bertahan hidup*” untuk penduduk setempat. *Local strongman* mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan masyarakat dibandingkan apa yang diperoleh dari pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan pokok. Teori ini membingkai diskusi mereka dengan istilah personalisme, klientisme, atau relasi patron-klien. Sehingga kehadiran *local strongman* ini menjadi tumpuan hidup masyarakat, dan mampu memberi kesejahteraan dengan pekerjaan dan upah. Sehingga masyarakat semakin terikat dan adanya hidup ketergantungan terhadap *local strongman* tersebut.

organisasi lainnya. Artinya, tujuan mereka untuk negara adalah untuk membuat aturan yang mengikat yang membimbing perilaku masyarakat atau setidaknya, untuk mengotorisasi perilaku masyarakat atau menguasai organisasi lain khususnya untuk membuat aturan-aturan pada aspek tertentu. Dengan “aturan” ia mengartikan hukum, peraturan, keputusan dan seperti pejabat negara yang menunjukkan kesediaan mereka untuk menegakkan melalui pemaksaan yang mereka tetapkan. Aturan mencakup segala sesuatu dari hidup, komitmen kontrak, membayar tunjangan tepat waktu. Mereka melibatkan seluruh peranti hak milik dan salah satu definisi yang tak terhitung lainnya dari batas-batas yang menggambarkan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.

3. Berhasilnya *local strongman* menguasai lembaga-lembaga dan sumber daya negara merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan.⁸ (Migdal, 2001).

Tinjauan analisis penelitian Migdal tentang melemahnya kekuasaan negara akibat kekuasaan *local strongman*. Sebagai organisasi besar, seharusnya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melakukan kontrol sosial. Sebab negara tidak dapat dipisahkan dari organisasi kemasyarakatan dan selalu hidup berdampingan dengan organisasi sosial di luar negara, baik formal maupun informal. Agar organisasi di luar negara mau di atur dan di imbangi aktivitas sosial – politiknya. Namun realitasnya, kelompok-kelompok sosial dan orang-orang yang berkuasa di luar pemerintahan telah menunjukkan eksistensi dan kekuasaannya melawan otoritas pejabat negara⁹. Menurut Migdal para *local strongman* ini terdiri dari basis sosial seperti tuan tanah, petani kaya, pengusaha lokal, kepala suku yang membuat kebijakan negara memiliki ketergantungan atas perannya. Migdal menjelaskan bahwa kunci kesuksesan *local strongman* bukan terletak pada kekuasaan formal atau resmi yang diciptakan. Namun pada pengaruh yang dimiliki. Apalagi *local strongman* ini

⁸ Menurut Migdal para *local strongman* ini terdiri dari basis sosial seperti tuan tanah, petani kaya, pengusaha lokal, kepala suku yang membuat kebijakan negara memiliki ketergantungan atas perannya. Apalagi *local strongman* ini berhasil menempatkan orang dan kerabatnya di lingkaran kekuasaan (segitiga akomodasi). Sehingga persekutuan antara birokrasi, politisi, dan *local strongman* tidak mengherankan jika regulasi pemerintah selalu berorientasi pada keuntungan secara politik, ekonomi, sosial budaya kepada orang-*local strongman* ini.

⁹ Migdal menjelaskan, *local strongman* mampu menyusun kekuatan dengan sumber dayanya sendiri agar mendapat pengakuan dari masyarakat. Sehingga peran kuasanya mampu menandingi legitimasi pemerintah. Aturan-aturan resmi negara buat apa diikuti dan dijalankan, karena aturan perundangan negara merupakan retorika para elit politik dan birokrasi, sehingga bagi *local strongman* tidak ada alasan mematuhi aturan kebijakan tersebut.

berhasil menempatkan orang dan kerabatnya di lingkaran kekuasaan (segitiga akomodasi). Sehingga persekutuan antara birokrasi, politisi, dan *local strongman* tidak mengherankan jika regulasi pemerintah selalu berorientasi pada keuntungan secara politik, ekonomi, sosial budaya kepada orang *local strongman* ini. Migdal menjelaskan, *local strongman* mampu menyusun kekuatan dengan sumber dayanya sendiri agar mendapat pengakuan dari masyarakat. Sehingga peran kuasanya mampu menandingi legitimasi pemerintah.

Menurut Migdal beragam teori sosial dan politik sudah disampaikan, untuk menjelaskan solusi tepat ketika adanya ketidaknyamanan negara dalam mencapai kendali kuasa dan mendapat legitimasi dari masyarakatnya. Dengan mengkritisi teori modernisasi, Marxis, atau dependen (ketergantungan), teori-teori ini dianggap belum menjawab ketika adanya kelemahan kewenangan dari negara tersebut. Dalam teori modernisasi misalnya, dianggap mengindahkan terjadinya permasalahan sosial atau konflik sosial di dalam negara. Sementara dalam teori Marxis, lebih sibuk terhadap pertentangan kelas yang terjadi di luar negara. Teori-teori ini ketika menjabarkan bagaimana legitimasi negara melemah, atau kenapa negara menjadi kuat dan negara lain melemah. Ketiga teori tersebut dianggap tidak memberi jawaban permasalahan tersebut. (Migdal, 2001)

(Lambach, 2004) bahkan meyakini paparan Migdal ini, negara memang bukanlah satu-satunya organisasi yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Di luar negara berbagai macam organisasi atau komunitas sosial-politik, turut mempengaruhi dan mengendalikan elit-elit pejabat negara.

Cara mereka mendapat legitimasi dan kuasa seperti para birokrat atau pejabat negara dengan cara memberikan insentif dan bantuan sosial, serta memberikan perlindungan keamanan. Bahkan para pemimpin informal tersebut memberi sanksi sosial dan hukuman terhadap individu yang melanggar aturan.

Dengan banyaknya organisasi atau kelompok sosial di luar negara, masyarakat dihadapkan pilihan sulit untuk memilih satu diantara dua kekuatan tersebut. Masyarakat akan mencari organisasi yang mampu memanasikan diri sebagai kelompok yang memberi stimulus konstruksi “strategi bertahan hidup”. Masyarakat dalam hal ini bukan berarti hidup dalam kebebasan dengan tanpa adanya aturan yang mengikat. Faktanya masyarakat hidup dalam aturan-aturan, tetapi dalam alokasi yang tidak terpusat. Berbagai sistem aturan dan peradilan akan mengatur mereka secara bersamaan. Berhasil tidaknya sebuah organisasi ini melakukan kontrol sosial terhadap anggotanya, terlihat saat mereka mematuhi segala aspek dan aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Tetapi mereka meyakini dan secara sadar bahwa legitimasi yang mereka berikan adalah benar¹⁰.

Para *local strongman* ini tumbuh berkembang dari keroposnya institusi formal negara. Aktor yang berada di luar negara dan di dalam negara saling bekerjasama untuk menciptakan hubungan jejaring ekonomi politik secara

¹⁰ Kekuasaan dan kewenangan negara seperti kontrol sosial, dominasi, dan hegemoni merupakan alat politik yang paling ampuh. Dalam rangka mengatur, mengarahkan, memaksakan dan membatasi segala tindakan masyarakat. Tanpa adanya kekuasaan dan kewenangan untuk mengendalikan masyarakat, maka legitimasi negara akan melemah. Yang terjadi, masyarakat akan beralih dan berpaling kepada aturan dan arahan dari kelompok informal yang berada di luar negara, sehingga ada perebutan kontrol sosial antara negara dengan pemimpin di luar negara.

personal dan kelembagaan yang saling memberi keuntungan melalui proses manipulasi kebijakan politik untuk mengakumulasi kekayaannya.

Kehadiran *local strongman* sebagai manifestasi kekuatan di luar negara, keberadaannya mampu mempengaruhi kebijakan dengan menempatkan orang-orangnya di dalam pemerintahan dan mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Keberadaan *local strongman* bisa dilihat dari aspek sejarah, kultur, dan sosial sejak pra kemerdekaan. Sebagaimana dipaparkan Agustino dan Yusoff (2010), *local strongman* awalnya bukan figur buruk dalam tatanan sosial politik Indonesia. Mereka dianggap pemberontak yang menentang kekuasaan pemerintahan kolonialis. Sehingga sikap dan tindakan mereka dianggap pahlawan, karena dianggap membantu perjuangan melawan kolonialisme. Namun setelah konstelasi sosial dan politik Indonesia mengalami kemerdekaan. Eksistensi *local strongman* mendapatkan stigma negatif, karena tidak lagi berjuang dan menentang pemerintahan yang korup. Tetapi berupaya mengendalikan pemerintah serta mengakumulasikan kekayaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya untuk memanfaatkan situasi politik Indonesia saat itu.

Namun riset Migdal ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah eksistensi *local strongman* akan terus menguat, meski negara mendapatkan kekuasaan dan legitimasinya dalam mengontrol sosial. Apakah *local strongman* akan terus menjadi penghambat kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Analisis Migdal ini mendapat kritikan dari hasil riset Sidel di Thailand, Filipina, dan Indonesia. Studinya diklaim sebagai kerangka alternatif untuk menjawab argument – argument Migdal. (Sidel, 2005).

Sidel mencoba mengkaji ulang karya Migdal dengan sebutan lain *bossism*, untuk mengungkap pola kuasa dan peran elit kuat lokal yang disebut Migdal sebagai *local strongman*. Sidel menawarkan antitesis *local strongman* yang awalnya sebagai pemimpin dari kelompok masyarakat yang berada di luar negara. Sidel berpandangan kemunculan *bossism* bukan dari luar lingkaran pemerintah, melainkan hasil kombinasi sifat-sifat dasar negara dengan sistem pasar yang kapitalistik. Artinya struktur dan sistem politik negara yang berperan untuk memproduksi, mengandung, serta melahirkan para *bossism* dalam dimensi kehidupan sosial dan politik¹¹ (Sidel, 2005, Nurcholis, 2016).

Sidel mempertanyakan relasi patron – klien, klientilisme, atau personalisme yang disampaikan Migdal. Konsep tersebut selalu menjadi rujukan untuk membingkai kekuatan dasar *local strongman* yang menjadi patron, untuk memberi kebaikan sosial. Tawaran kebaikan sosial ini merupakan strategi *local strongman* untuk mendapatkan legitimasi dan kendali kuasa terhadap masyarakatnya. Faktanya menurut Sidel, *bossism* tidak harus mendapat ‘permintaan’ dari rakyat. Karena *bossism* mendapatkan legitimasi dan kuasanya, tidak perlu memberlakukan ‘strategi bertahan hidup’ (Sidel, 2005).

Selain menyanggah argumen relasi patron – klien, Sidel juga menyanggah kehadiran *bossism* sebagai penghambat tumbuhnya kapitalisme. Sementara bagi *local strongman* yang disampaikan Migdal, investasi dan kemajuan pembangunan ekonomi merupakan ‘musuh’. Para *bossism* di Indonesia realitasnya muncul karena adanya pertumbuhan industri dan kapitalisme.

¹¹Sidel menegaskan, kemunculan *bossism* ini harus dipahami sebagai perluasan negara daripada mewakili komunitas atau kelompok masyarakat yang berada di luar negara. Sidel menyarankan untuk menganalisis faktor struktural negara ketika hadirnya aktor-aktor kuat di daerah.

Mereka malah menjadi agen terdepan menumbuhkan sektor perekonomian dan investasi di daerah.

Kehadiran *bossism* ini dikuasai para politikus lokal dan kelompok politik marga (*political clan*). Mereka dikenal bukan saja memiliki keuletan politik tetapi memiliki keuletan ekonomi¹² (Sidel, 2005). Namun demikian, kekuasaan *bossism* bukan cerminan relasi patron-klien atau kekuatan tuan tanah. Individu dikatakan sebagai *local strongman* karena kepemilikan tanah pribadi yang luas atau kekuatan finansial yang berlimpah dianggap terlalu berlebihan.

Bossism mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, bukan dari status kepemilikan materi tetapi dari sumber-sumber yang diperoleh dari negara untuk dijadikan modal perdagangan. Mereka mengumpulkan tanah luas dan kekayaannya justru setelah menjabat di dalam pemerintahan, atau melakukan manipulasi untuk memperoleh bisnis dari negara¹³ (Sidel, 2005).

Kendati demikian, kasus-kasus kehadiran *bossism* di Filipina dan Thailand berbanding terbalik dengan pola kuasa *bossism* di Indonesia. Selama tiga dasawarsa di bawah kekuasaan Soeharto, sangat terpusat dan tersekat oleh segelintir elit jaringan patronase Soeharto. Hirarki komando militer berjenjang hingga struktur pemerintahan di tingkat lokal. Perwira aktif militer dan purnawirawan diangkat bukan saja menduduki kursi di parlemen lokal, tetapi memegang jabatan politik sebagai kepala daerah. Implikasi dari organisasi

¹²*Bossism* ini menggunakan peran yang monopolistik dalam daerah kekuasaannya melalui kepemilikan tanah, jaringan perniagaan, konsesi hutan atau pertambangan, perusahaan transportasi, atau kontrol terhadap kegiatan ekonomi ilegal.

¹³Menurut Sidel, para *bossism* tumbuh subur dalam lingkungan yang tidak lagi bersandar pada kepemilikan tanah besar atau relasi patron klien. Kontrol *bossism* terhadap pejabat (birokrasi) telah memberi akses untuk pengaturan sumber dan hak-hak istimewa dari negara. *Bossism* ini menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan dan mempengaruhi berbagai regulasi agar kekuasaannya terus langgeng dan bertahan lama.

negara semacam ini jelas menyulitkan munculnya *local strongman* atau *bossism*, bahkan gerak kuasanya juga akan sangat terbatas karena kekuasaan Soeharto.

Singkatnya, terpusatnya sebuah sistem politik dan watak dasar negara yang otoriter tidak memungkinkan para *local strongman* muncul ke permukaan, bertahan hidup, dan tumbuh subur di Indonesia. Mereka baru muncul untuk menunjukkan eksistensinya ketika pergantian kekuasaan Soeharto di era reformasi. Ketika pergantian kekuasaan, kemunculan *bossism* di Indonesia ditentukan oleh sifat dasar negara yang secara masih struktur terpusat-otoriter. Transisi politik tahun 1999 menghasilkan penyerahan kekuasaan negara kepada elit kuat lokal. Mereka menggalang kekuatannya untuk merebut suara pemilih untuk menduduki jabatan politik di daerah. Kekuasaan yang tadinya terpusat kini berpindah ke bawah, ke samping, dan ke luar dari birokrasi.

Berkat demokratisasi dan desentralisasi, para pialang kekuasaan ini memperoleh kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk meraih jabatan-jabatan politis di lembaga negara. Politikus lokal bekerjasama dengan para pengusaha lokal untuk menjalankan bisnisnya, padahal usahanya dianggap ilegal. Elit pengusaha lokal, DPRD, dan pemerintah saling berkolaborasi menjamin desentralisasi pemerintahan menghasilkan keputusan – keputusan resmi baru yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya lokal demi menguntungkan kepentingan mereka¹⁴.

¹⁴Para tokoh kunci (elit-elit lokal) merambah ke penempatan pegawai, personal kepolisian, angkatan bersenjata, PNS, peradilan, pemuka-pemuka agama. Hubungan antara pengusaha, perantara, pialang, dan warga desa, terletak di luar struktur negara.

Kemunculan para bossism di Indonesia mulai bergeser ke pemelukada, dan telah memudahkan untuk menguatkan posisi dan kendali kuasa para *bossism* lama dan memunculkan *bossism* baru. Sekalipun masih bisa dihambat oleh sisa kekuatan kelembagaan negara yang demokratis sekalipun. Sementara itu, itu melihat perbedaan antara teori *local strongman* (Migdal) dan teori *bossism* (Sidel). Peneliti sajikan pada tabel di bawah ini mengenai perbandingan kedua teori tersebut untuk mempermudah dimana letak perbedaan dari kedua teori tersebut dalam mengungkap pola kuasa dan peran *local strongman* dan *bossism* ketika mensiasati kebijakan dan kendali kuasa di daerah.

Tabel 2. 1

Perbandingan *Local strongman* (Migdal) dan *Bossism* (Sidel)

Perbandingan	Migdal	Sidel
Istilah	<i>Local Strongman</i>	<i>Bossim</i>
Aktor	Kepala Suku, Tuan Tanah, Pimpinan Tradisional	Kepala Daerah, Anggota Dewan, Pengusaha, Komandan Militer
Perspektif	Historis Kultural	Struktural
Latar Belakang Ekonomi	Selalu orang kaya atau pemilik tanah	Tidak selalu orang kaya
Proses Pembentukan	Masyarakat Terfragmentasi, dan independensi antar organisasi sosial di negara baru merdeka	Kegagalan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial

<p>Cara Bertahan Hidup Aktor</p>	<p>Memanfaatkan hubungan patron-klien, dan menggantungkan pada relasinya dengan para politisi dan birokrat</p>	<p>Tanpa memerlukan relasi patron – klien. Menggunakan jabatan politik, serta mengendalikan dukungan investor dan negara dalam perekonomian yang kapitalistik</p>
<p>Konteks kemunculan dan dampak dari pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran local strongman telah menjadikan otoritas negara menjadi lemah (weak state). • Local strongman dan elit tradisional tumbuh di dalam organisasi sosial yang mirip jejaring • Local strongman melakukan kontrol sosial dengan memberikan kebaikan kebutuhan hidup masyarakat, yang dinamakan “strategi bertahan hidup”. • Local strongman merupakan penghambat tumbuhnya perekonomian dan investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemunculan bossism dibentuk oleh struktur negara. Negara berperan memproduksi dan melahirkan bossism di daerah. • Bossism ini tidak memiliki kekayaan dan kepemilikan tanah luas, justru kekayaannya setelah menjabat dan mendapatkan kekuasaan. • Bossism dalam melakukan kontrol sosial tidak perlu adanya permintaan dari masyarakat (kebaikan), dengan intimidasi dan kekerasan merupakan strategi untuk mengontrol masyarakat. • Negara melakukan kontrol penuh terhadap

	<ul style="list-style-type: none"> • Kemunculan local strongman merupakan kalangan elit lokal yang memiliki kekayaan dan kepemilikan tanah. • Local strongman mampu menangkap lembaga dan elit pemerintah dengan melakukan “segitiga akomodasi”, dengan menempatkan kerabat, kolega, atau orang-orang kepercayaan, untuk masuk di institusi negara (elit birokrasi). 	<p>perekonomian, sehingga tidak ada hambatan ‘nasionalis’ untuk mengatur perekonomian sebagaimana oleh kalangan komunitas atau etnis. Negara memiliki kendali penuh terhadap perekonomian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara melakukan kontrol penuh terhadap perekonomian, sehingga tidak ada hambatan ‘nasionalis’ untuk mengatur perekonomian sebagaimana oleh kalangan komunitas atau etnis. Negara memiliki kendali penuh terhadap perekonomian. • Bossism menjadikan negara kuat karena mengendalikan langsung kekuasaan. Sehingga memberi rasa aman, namun negara menjadi predator.
--	--	--

Sumber: Migdal, 2001; Sidel, 2005.

2.1.3 Teori Modal

Teori modal mempunyai ikatan yang erat dengan persoalan kekuasaan dan kekuatan. Modal menjadi suatu konsentrasi kekuatan spesifik yang terjadi pada di dalam ranah yang tengah mengalami pertarungan. Hal tersebut dikarenakan setiap ranah akan menunjuk untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat berkuasa secara baik dan bertahan di dalamnya (Bordie,1986; Harker,2009).

Situasi sumber daya modal yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan dominasi suatu keadaan sosial. Modal merupakan rekapitulasi kerja yang dapat berupa hal-hal materiil yang memiliki nilai simbolik dan signifikansi secara kultural dengan dialokasikan secara privat untuk memperoleh kekuatan sosial. Kekuasaan dan kekuatan sosial di dalam ranah yang mengalami pertarungan dapat dihasilkan oleh energi sosial dari modal (Bordie,1986; Harker,2009).

Adapun kategorisasi dari modal yang disebutkan searah dengan pemikiran Bourdieu diantaranya (Halim, 2018; Krisdinanto, 2014; Krisdinanto, 2022; Fathy, 2019; Putra dkk, 2022; Sumarno dkk, 2013):

a. Modal Sosial

Modal sosial merupakan semua jenis hubungan sebagai sumber daya penentuan dari kedudukan sosial. Pada hakikatnya modal sosial merupakan hubungan sosial yang memiliki nilai antar individu. Hal ini dapat dicontohkan dengan separuh masyarakat yang melakukan interaksi antar kelas dalam lapisan sosial di masyarakat.

Untuk menghindari pembiasan makna, maka modal sosial memiliki kecenderungan fokus yang terletak pada tiga pokok penting. Pertama, modal sosial yang menyangkut norma, institusi, konsep hidup, norma, dan yang lainnya.

Kedua, model penyelenggaraan modal sosial yang menjadi bagian analisa yaitu memiliki nilai produktif bagi terwujudnya kepaduan sosial. (*social cohesiveness*). Ketiga, pendefinisian modal sosial hanya berkonteks interaksi dengan dunia luar yang sewajarnya harus terlibat proses adaptasi dan negosiasi. Selanjutnya menggiring individu lain untuk melaksanakan tindakan reinterpretatif terhadap modal sosial yang dimiliki.

Modal sosial dapat diukur dengan tiga cara. Pengukuran pertama, dukungan kelompok calon dapat diukur melalui jumlah dukungan kandidat lain. Adapun pengukuran ini dapat melibatkan dukungan dari individu dengan alasan bila dukungan individu mempunyai pengaruh kepada dukungan kolektif. Pengukuran kedua dapat memberikan informasi antara ikatan pribadi dari calon kelompok di luar partai politik dengan partisipasi dari kandidat. Adapun kelompok di luar partai politik dapat berupa kelompok sipil lokasi, asosiasi profesional, klub, dan kelompok lainnya. Pengukuran ketiga ialah pengakuan nama yang menunjukkan seberapa dikenal kandidat dalam asosiasinya.

b. Modal Kultural

Modal kultural merupakan seluruh kualifikasi intelektual yang dapat dibuat dengan pendidikan formal dan warisan keluarga, seperti kepemilikan benda budaya bernilai tinggi, kapasitas menampilkan diri di depan publik, dan keahlian atau pengetahuan tertentu dari hasil pendidikan formal. Contoh lain dari modal kultural merupakan kemampuan menulis, cara bergaul, dan cara pembawaan yang memiliki peran di dalam penentuan kedudukan sosial. Hal tersebut menjadikan modal sebagai representasi dari kemampuan intelektual yang memiliki hubungan dengan aspek etika, logika dan estetika.

Pada dasarnya, modal kultural dapat berupa keyakinan akan nilai-nilai tentang semua hal yang dipandang benar dan bisa diikuti dengan cara untuk mengimplementasikannya. Modal kultural tidak terimplementasikan dengan sendirinya dalam realita dengan memiliki manfaat untuk individu yang meyakinkannya atau masyarakat pada umumnya. Melainkan dapat berhenti sebagai suatu hal yang tidak memberikan manfaat apapun. Komitmen tinggi dan kemampuan dari pihak terkait sangat dibutuhkan untuk melestarikan, memelihara, memanfaatkan, dan memperbaharui modal kultural.

c. Modal Ekonomi

Modal ekonomi merupakan sumberdaya yang menjadi sarana finansial dan sarana produksi. Pada dasarnya, modal ekonomi menjadi jenis modal yang mudah untuk dikonversikan ke dalam bentuk modal lainnya. Adapun cakupan dari modal ekonomi dapat berupa alat-alat produksi, uang, dan materi yang menjadikan modal ini gampang digunakan untuk semua tujuan dan diwariskan ke generasi selanjutnya.

Kategorisasi modal ekonomi yang lebih nampak ialah masalah uang. Selanjutnya modal uang tersebut digunakan untuk membiayai kampanye bagi individu maupun partai politik yang berusaha untuk mendapatkan perhatian publik. Sarana dari kampanye dapat menggunakan media promosi seperti TV, koran, baliho, spanduk, dan media promosi lainnya yang membutuhkan dana besar.

d. Modal Simbolik

Modal simbolik merupakan jenis sumber daya yang dimaksimalkan untuk meraih kekuasaan simbolik. Simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil

mewah, kantor, gelar, status tinggi, pretise, dan keluarga ternama seringkali dibutuhkan dalam kekuasaan simbolik. Dengan arti lain, modal simbolik dapat didefinisikan sebagai semua bentuk pengakuan individu atau kelompok secara institusional dan non-institusional. Simbol kekuasaan mempunyai kekuatan untuk mengkontruksi relitas yang selanjutnya memiliki kapasitas untuk menggiring orang untuk mengakui, mempercayai, dan mengubah pandangan tentang realitas individu, kelompok, partai politik, atau sebuah banga.

2.1.4 Relasi Patron Klien

Dalam dalam sub bahasan ini mengacu pada argumen Migdal bahwa untuk mendapatkan legitimasi dan kontrol sosial, pola kuasa dan peran yang dilakukan oleh pemimpin lokal harus mencakup komponen “strategi bertahan hidup” melalui pemberian kebaikan sosial. Strategi ini akan berhasil jika *local strongman* mbingkai sebuah relasi antara patron dengan banyak klien yang kuat. *Local strongman* diposisikan sebagai ‘patron’, karena memiliki sumber daya materi atau kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang dijadikan kliennya. Tindakan atau kebaikan sosial yang dilakukan *local strongman* sengaja diciptakan agar membentuk klientilisme untuk menguatkan posisi dan kekuasaan di wilayah teritorialnya.

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang berasal dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam sub bab ini, peneliti ingin menjelaskan secara jelas konsep dari relasi patron – klien. Berdasarkan beberapa referensi, relasi antara patron dan klien adalah interaksi

sosial antara aktor yang berada dalam posisi yang tidak seimbang dan terjadi hubungan timbal balik. Relasi ini dilakukan secara vertikal (satu aktor memiliki posisi yang lebih tinggi) maupun secara horizontal (keduanya memiliki posisi yang sama), namun kuasa patron mampu mengendalikan relasi ini.

Istilah patron berasal dari bahasa Romawi Kuno yang diambil dari kata *patronus* yang memiliki sejumlah warga. Sementara warga yang tingkatannya lebih rendah disebut *clients*, yang berada di bawah perlindungan *patronus*. Walaupun secara hukum para klien bebas merdeka dan memiliki hak-haknya, namun mereka tidak sepenuhnya merdeka¹⁵. Klien memiliki hubungan dekat dengan keluarga pelindung (patron). Hubungan antara patron-klien ini dibentuk berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik yang biasanya turun temurun. Dalam bahasa Spanyol, patron merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh. Kata klien mengacu pada seseorang yang menjadi bawahan atau orang yang menerima perintah serta disuruh oleh orang yang lebih tinggi (sang patron).

Hubungan antara patron-klien merupakan hubungan di mana kedua pihak memiliki peran yang tidak seimbang. Seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosio-ekonominya yang lebih tinggi dan superior memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya yang dimilikinya untuk melindungi dan memberikan keuntungan kepada individu yang berada dalam posisi yang lebih rendah dan inferior secara sosial dan ekonomi. Sementara para klien akan membalasnya dengan menawarkan

¹⁵ Relasi patron-klien ditandai hubungan antara kedua peran, dimana salah satu individu (patron) memiliki sumber daya ekonomi lebih tinggi. Kekuatannya ini mampu menyediakan perlindungan atau keuntungan bagi seseorang dengan statusnya lebih rendah-miskin (klien) yang tidak mempunya. Karena klien merasa dibantu oleh patron, maka terjadi hubungan resipokral (timbal balik) dengan menawarkan bantuan, jasa, ataupun dukungan politik kepada patron sebagai pelindungnya. (Scoot, 1993)

dukungan dan bantuan jasa pribadi kepada patron, yang dijadikan sebagai pertukaran jasa dan barang antara patron dan klien. (Usman, 2004).

Menurut Scott patron-klien merupakan hubungan timbal balik antara dua orang (yang memiliki perbedaan status sosial ekonomi) yang dijalin secara khusus, atau dengan dasar saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima, dimana status sosial yang lebih tinggi (patron) dengan adanya sumber daya yang dimiliki memberikan perlindungan serta keuntungan kepada orang dengan status sosial lebih rendah (klien). (Scott. 1972).

Menurut Scott, gejala patron-klien dipengaruhi oleh tiga kondisi. **Pertama**, terdapatnya perbedaan (*inequality*) yang mencolok dalam kepemilikan kekayaan, status, dan kekuasaan. Tradisi yang berlaku, seorang patron lebih mendasarkan dan pada kekuatan serta jalur untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, dan bukannya pada pewarisan kedudukan. **Kedua**, tidak adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status maupun kekayaan. Ketika keamanan seseorang terancam dan kontrol sosial tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan maka hubungan patronase dipilih sebagai mekanisme atau sarana untuk memperoleh keamanan pribadi. Ketidakamanan akan muncul dalam lingkungan yang ditandai oleh kelangkaan sumber-sumber daya, dan usaha mendapatkan kekayaan serta kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan yang bersifat *zero-sum*, yaitu keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai suatu kehilangan bagi pihak lain. Dengan demikian, ikatan-ikatan pribadi secara langsung telah mengganti peranan hukum, nilai-nilai bersama serta pranata-pranata yang kuat. **Ketiga**, yang juga merupakan implikasi definisi hubungan patronase adalah ketika

ikatan-ikatan kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan untuk mendapatkan perlindungan serta memajukan diri.

Politik patronase sebagai kekuatan kohesi yang memainkan peranan penting dalam sistem politik tertentu. Misalnya politisi (patron) yang sangat kaya telah mendominasi demokrasi Indonesia, juga menekankan pada tema patronase sebagai perekat politik. Namun demikian, patronase menegaskan bahwa pertukaran kepentingan kerap muncul disaat kampanye pemilu, hubungan antara aktor dan pemilih, dan bagaimana relasi seperti ini di perlanjar dengan adanya keterikat kepentingan antara patron dan klien. Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiiaannya kepada sang patron. (Sukmajati, 2015).

Sejalan dengan masalah tersebut diatas, transformasi politik yang tengah berlaku di Indonesia dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, telah memberikan dampak negatifnya tersendiri bagi proses demokratisasi. Hal Ini karena pemilihan kepala daerah langsung telah membuka ruang bagi patronase (logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam lagi. Para kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai pemilik sumber utama. Peranan ini bukanlah satu hal yang sukar untuk dilaksanakan oleh para kepala daerah, melalui kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak peluang untuk menggunakan institusi publik sebagai domain kekuasaannya,

serta mendistribusikan *public resources* yang berada di bawah kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu ketika diperlukan. (Agustino, Patronase Politik Era Reformasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi, 2014)

Dalam kenyataan praksis, relasi patron-klien yang terlihat sebagai fakta sosial-kultural yang didasarkan pada perjanjian informal menjadi pembungkus yang halus dari hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang diwarnai ketidaksetaraan, maka peluang terjadinya eksploitasi sangat besar. Relasi patron-klien banyak terjadi dalam ragam kehidupan manusia. Scott menyebutkan tiga faktor penyebab tumbuh berkembangnya relasi patronase.

Pertama, adanya ketidakseimbangan pada pertukaran antara patron dan klien. Patron memiliki kekayaan, dan status sosial lebih tinggi dari klien. Posisi klien adalah seseorang individu yang telah memasuki sebuah hubungan pertukaran yang tidak setara Dimana ia tidak dapat membalas sepenuhnya dengan materi. Klien memiliki kewajiban untuk membalas jasa patron yakni dengan memberikan tenaga dan pengabdian.

Kedua, sifat tatap muka dalam hubungan patron-klien. Patron tidak sembarangan dalam memilih orang yang sudah dikenalnya untuk dapat bekerjasama dan dapat dijadikan kliennya. Meringankan pekerjaan pada hubungan kedekatan adalah salah satu cara yang di tempuh oleh patron. Jasa yang akan diberikan secara timbal balik oleh patron dan klien digunakan untuk beragam keperluan serta jaminan sosial sehingga memberikan rasa tentram dan nyaman pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Ketiga, sifat luwes yang mencerminkan adanya kasih sayang yang mendasari sebuah hubungan antara patron dan klien, misalnya persahabatan dan kekerabatan.

Ikatan mempermudah akses seseorang dalam memperoleh pekerjaan atau memperoleh sumberdaya sosial dan untuk keberlangsungan hidup bahkan adanya perubahan sosial terjadi, hubungan tersebut akan terus terjalin selama patron dan klien memiliki sesuatu untuk ditawarkan sehingga hubungan ini akan terus bertahan.

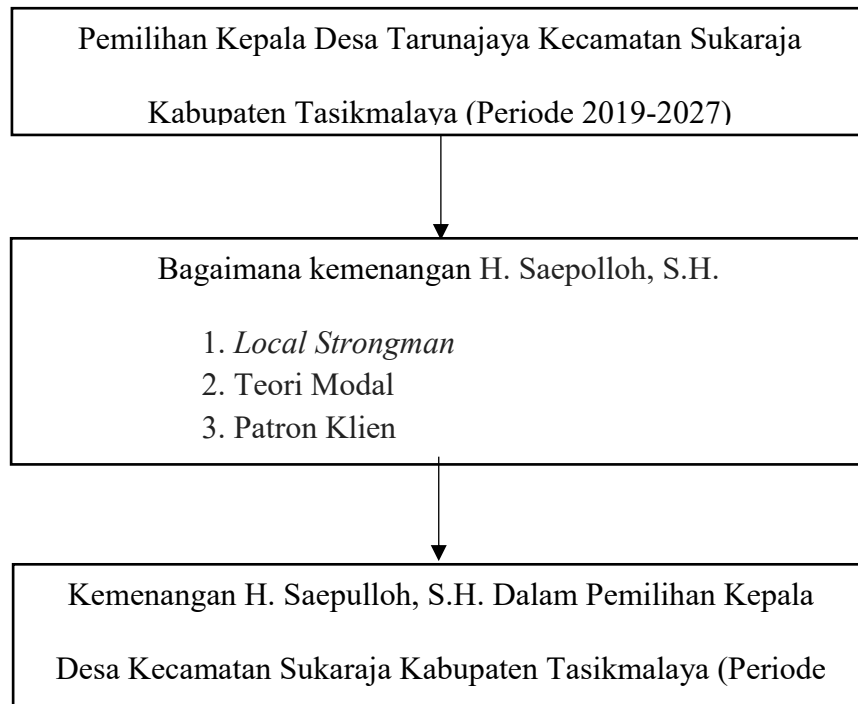
Hubungan patron klien memiliki sifat yang sama dengan pertukaran pada umumnya, keseimbangan pertukaran pada hubungan patron-klien adalah bahwa sebagai pemilik sumber daya memiliki hak untuk melindungi kliennya dan memenuhi segala kebutuhannya. Sedangkan klien memberikan tenaganya untuk bekerja dan loyalitas atau kesetiaan serta kejujuran dalam bekerja. Tidak semua manusia dididik oleh pertimbangan pertukaran sosial, namun hanya sebagian besar¹⁶. Ada dua syarat melakukan pertukaran sosial. Harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui interaksi pada tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui interaksi dengan orang lain dan harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. (Poloma, 2003).

Memperhatikan berbagai konstruksi teoritis yang sudah dipaparkan di atas sebagai alat analisa, Penelitian ini fokus pada hubungan klien yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Tarunajaya Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019. Bagaimana relasi yang terjalin antara aktor politik (patron) yang merupakan pejabat *incumbent* dengan masyarakat pemilik suara (klien). Peneliti juga berusaha

¹⁶ Scott memang tidak secara langsung memasukan hubungan patron-klien ke dalam teori pertukaran. Meskipun demikian, jika memperhatikan uraian-uraiannya mengenai gejala patronase. Maka akan terlihat unsur pertukaran yang merupakan bagian terpenting dari pola semacam ini. Relasi patron-klien ini berawal dari pemberian barang atau jasa dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak. Bagi pihak yang menerima barang atau jasa berkewajiban membalas pemberian tersebut. (Scott, 1992).

untuk melihat bagaimana pola hubungan tersebut terjalin, apakah secara langsung dengan transaksi ekonomi, kerja atau melalui pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran



Menggunakan kerangka teoritik *Local Strongman*, Patron Klien, Teori modal. Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan dan mengungkap bagaimana relasi yang terjalin antara aktor politik (patron) yang merupakan pejabat *incumbent* dengan masyarakat pemilik suara (klien). Peneliti juga berusaha untuk melihat bagaimana pola hubungan tersebut terjalin, apakah secara langsung dengan transaksi ekonomi, kerja atau melalui pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah tersebut. Serta melihat bagaimana *local strongman* dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya melalui konsep relasi patron klien

berhasil meraih jabatan sebagai kepala desa di Desa Tarunajaya Kabupaten Tasikmalaya.